



**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT DAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI II DPR RI DENGAN DIRJEN OTDA KEMENDAGRI,
APPSI, APKASI, DAN ADKASI**

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	:	Selasa, 19 September 2023
Waktu Rapat	:	Pukul 14.27 WIB – 15.36 WIB
Tempat Rapat	:	Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	:	Ahmad Doli Kurnia Tandjung / F-P.Golkar / Ketua Komisi II DPR RI
Acara Rapat	:	Membicarakan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024
Sekretaris Rapat	:	Dahliya Bahnan, S.H., M.H. (Kasubag Rapat Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	:	6 dari 48 orang Anggota dengan rincian:

A. ANGGOTA DPR RI:

PIMPINAN :

1. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua/F-PG)
2. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

1 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

0 orang Anggota dari 6 Anggota:

-

- 3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**
0 orang Anggota dari 7 Anggota:
 1. -
 - 4. FRAKSI NASDEM:**
1 orang Anggota dari 2 Anggota:
 1. Aminurokhman, S.E., M.M.
 - 5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
0 orang Anggota dari 3 Anggota:
 1. -
 - 6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**
0 orang Anggota dari 5 Anggota:
 1. -
 - 7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Teddy Setiadi S.Sos.
 - 8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**
1 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
 - 9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**
0 orang Anggota dari 1 Anggota:
 1. -
- B. UNDANGAN:**
1. Dirjen Otda Kemendagri (Dr. Akmal Malik, M.Si.)
 2. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI),
 3. Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI),
 4. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI):
 5. Bupati Dharmasraya,
 6. Bupati Serang,
 7. Gubernur Jambi,
 8. Gubernur Sulawesi Selatan (Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si.).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / KETUA KOMISI II DPR RI / F-P.GOLKAR (AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG):

Ketuanya sekarang sebenarnya siapa ya, Pak Isran Noor diwakili oleh Bu Nur Provinsi Jambi.

**Yang terhormat Ketua, Saudara Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI),
Bupati Dharmasraya,**

Ini hadir Bupati Bupati saya nih,

Bupati Serang,

Kemudian ada *nah* ini Bupati saya juga, Bupati saya Bupati Pak Gaus. Ini Dharmasraya, Serang, Sijunjung. Yang Sijunjung Bupati saya Bupati Pak Gaus juga. Sebelahnya Bupati oh ADKASI,

Yang terhormat Saudara Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Pak Lukman masih ya,

Di mana beliau, oh biasanya rajin.

Juga yang sama-sama kita hormati seluruh Pimpinan Anggota Komisi II DPR RI.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan hidayah-Nya kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Terutama tugas dan tanggung jawab konstitusional kami di DPR dalam hal pengawasan dalam keadaan sehat walafiat.

Rapat ini tidak memerlukan kuorum karena rapat ini di gelar atas permohonan dari ketiga asosiasi ini untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi rapat ini adalah Rapat Dengar Pendapat Umum (Audiensi) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia kepada Komisi II DPR RI.

Oleh karena itu nanti kita sifatnya *brainstorming* saja diskusi. Maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.27 WIB)

(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang hadir pada siang hari ini. Sesuai dengan surat yang disampaikan, acara atau RDPU ini akan membicarakan atau menyampaikan aspirasi terkait persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 ya.

Nah seperti biasanya rapat ini memang diatur mekanismenya, kita sepakati dulu sampai pukul berapa ini.

Kita ada rapat lagi 18 15.30 ya 15.30, ya 15.30 lah ya 1 jam ya kita sepakati 1 jam.

(RAPAT : SETUJU)

Nah oleh karena itu, saya kira untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada, langsung aja ya Pak Dirjen ya, masing-masing asosiasi ya. Jadi kami persilakan kepada Pimpinan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, kemudian nanti dilanjutkan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten, dan kemudian yang mewakili Asosiasi DPRD Kabupaten untuk menyampaikan penjelasannya.

Kami persilakan.

GUBERNUR JAMBI:

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sehat untuk kita semua,*

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi II DPR RI dan seluruh anggota,
Yang saya hormati Dirjen Daerah dan para Gubernur yang hadir,
Ketua ADKASI dan juga dari,
Ketua APKASI dan seluruh jajaran yang berbahagia,**

Izin kami Ketua untuk menyampaikan. Pertama kami bangga sekali hari ini bisa hadir di DPR RI ini terkait dengan niat kita semua untuk pemilukada kita yang berlangsung aman, kondusif, dan *insyaallah* keberlangsungan daripada pemerintahan Indonesia akan terbaik tentunya.

Yang kedua, terkait dengan pemilu yang berlangsung di Februari yang akan datang. Pada prinsipnya di daerah sudah mulai menyiapkan dengan baik, termasuk pendanaannya. Harap Pak Mendagri bahwa 2023 ini 40% sudah harus disiapkan oleh provinsi dan kabupaten kota tentunya. Sehingga 2024 nanti akan ada 60% sisanya. Artinya bahwa ini adalah bentuk keseriusan kita semua terhadap berlangsungnya pemilu dan pilkada ke depan, itu yang pertama.

Nah yang kedua, dari pihak-pihak KPU Bawaslu juga sudah siap. Meskipun ada sebagian daerah di Indonesia yang masih proses KPU-nya seleksi KPU-nya, kabupaten kota. Provinsi sudah lengkap semuanya, hanya ada beberapa kota kabupaten yang masih ada seleksi-seleksi untuk KPU-nya.

Secara umum persiapan-persiapan di daerah sudah sangat luar biasa. Tinggal lagi tinggal lagi proses yang kita anggap nanti penting adalah di mana kita setelah Pemilu Presiden Legislatif, tentu kita akan melaksanakan pemilukada. Pemilih para Gubernur dan juga Bupati Walikota.

Nah ini yang kami lihat bahwa euforia pemilihan Bupati Walikota nih tinggi sekali biasanya. Bahkan kalau saya bilang lebih tinggi dari Pileg, euforianya berbeda sekali.

Oleh karena itu kami mohon kiranya nanti dipertimbangkan oleh DPR RI Komisi II, apakah pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Bupati Walikota tetap di November 2024, ataukah mungkin dimajukan.

Kalau Pemilu Presiden dan Legislatif sepakat kita Februari karena rentang itu saya juga rentang yang pendek bagi teman-teman dari KPU bahwasannya membantu bekerja persiapan dan sebagainya. Tetapi kalau untuk pemilukada memang pertama euforianya tinggi, yang kedua *cost*-nya juga tinggi.

Sehingga mungkin nanti kampanyenya di atur lagi lebih lebih apa lebih singkat waktunya. Nanti mohon nanti kita bahas lagi ke depan, regulasinya, kemudian juga waktunya mungkin tidak pada bulan November.

Sebab kalau di bulan November memang saat-saat kita sedang negara sedang habis pilpres, mungkin negara mungkin belum keadaannya tidak stabil. Sebab esensi daripada pemilu itu adalah bagaimana keamanan negara cukup baik. Kemudian juga pembangunan juga baik tentunya.

Nah kami melihat bahwa sangat rasional kalau misalnya kita memajukan pemilu itu, pemilukada kita itu, apakah di September atau bulan berapa. Supaya nanti:

1. Durasi kampanye yang bisa singkat.
2. Tidak banyak nanti apa waktu rentang waktu itu juga *cost* politik yang keluar, kampanye yang panjang tadi.
3. Keamanan kita, sebab tujuan kita adalah bagaimana demokrasi kita ini baik, keamanannya juga baik, hasilnya juga baik, dan berkualitas.

Kemudian juga terakhir. Kalau pemilukada itu di bulan September atau bulan tidak November misalnya. Rentang teman-teman kami juga ke MK punya waktu. Kami yang hadir ini, saya dengan Pak Gubernur Bengkulu ini adalah pemilu hasil 2020 Pak. Artinya kami habis ini kan di 2024.

Tentu kita berharap, kami sampai akhir Desember pemimpin daerah. Ya jadi ketika sampai akhir Desember kami merasa masih kondusif daerah itu dan tinggal lagi mungkin setelah sengketa pilkada ini September misalnya ada jarak

sengketa Pilkada. Kemudian nanti di Januari sudah bisa pelantikan, misalnya. Ini contoh saja.

Nah tapi kalau November kita apa namanya, pemilukada. Lalu nanti setelah Januari itu masih proses MK dan sebagainya, ini butuh PJ-PJ lagi Pak. *Nah* ini yang saya lihat ini masalah kita.

Oleh karena itu, kami prinsipnya di daerah, kalau untuk kendaraannya semua sudah baik, sistem saya lihat, KPU, Bawaslu, data pemilih juga sudah oke saya kira. Hanya saja prosesnya ini yang kita perlu betul-betul kita wanti-wanti betul agar kondisi negara tetap stabil, keamanan dan semua dapat berjalan dengan baik tentunya.

Yang kedua, kami juga nanti dibantu oleh Gubernur Bengkulu untuk menambah dari apa yang kami sampaikan tadi.

Mungkin itu saja dari kami, mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI II / F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Gubernur.

Barangkali dari Asosiasi Pemerintah Provinsi ada tambahan.

Silakan, Pak Gubernur.

KETUA ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (APPSI):

Baik terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yang kita hormati Pimpinan rapat, kemudian Dirjen OTDA, Teman-teman saya Gubernur dan Bupati, peserta rapat yang kami muliakan,

Saya langsung saja melaporkan, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya pertama. Terkait dengan kesiapan di daerah menyambut pilkada serentak 2024.

Pertama dari sisi penganggaran, kami pastikan sebagaimana Jambi, Bengkulu juga demikian. Ini anggaran sudah kita plotting di APBD perubahan dan juga kita susun juga sekarang juga sedang pembahasan pengantar untuk APBD di 2024. Jadi dipastikan lagi sekali lagi, dari aspek penganggaran, daerah siap untuk melaksanakan pilkada serentak di 2024.

Kemudian yang kedua dari sisi penyelenggara, itu baik Bawaslu maupun KPU secara berjenjang, termasuk instrumen-instrumen lain juga sudah sangat siap dan sudah tersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian yang ketiga, terkait dengan antusias sambutan masyarakat Pak. Betul apa yang disampaikan Gubernur Jambi. Sambutan masyarakat di daerah itu terhadap pilkada itu justru tadi, memang lebih seru, lebih masif, lebih ditunggu-tunggu, bukan berarti pemilu tidak penting. Tapi ketika pilkada serentak ini dilakukan, saya kira pesta demokrasi itu akan betul-betul terasa di daerah dan ya ini akan pertama kali itu dilakukan secara serentak.

Pada terkait dengan itu pertama, posisi kami lah Pak. Ini contoh saya dan Gubernur Jambi yang dilantik pada bulan Februari 2021. Undang-Undang mengatakan kami akan berakhir itu pada bulan Desember akhir 2024 dengan posisi masa jabatan lebih kurang 3 tahun 10 bulan, posisi pada waktu itu.

Dan ini hemat kami dengan para Gubernur yang posisinya sama dengan saya. Andai nanti terjadi Pak, tidak satu putaran pilkada itu. Ada putaran berikutnya, putaran kedua lah mungkin gagal lah, bermacam-macam persoalan.

Usul kami sekalian, kami tidak bisa kami tidak tidak diakhirkan juga di akhir Desember itu, dengan menunjuk Plt yang ditugaskan. Karena menurut kami, kami masih dalam rentang jabatan 5 tahun itu juga. Saya kan secara kekuatan pengakuan masyarakat, dalam undang-undang dan sebagainya.

Saya pikir apapun yang terjadi, menurut saya itu akan lebih baik serah terima itu ketika dipastikan di daerah itu terpilih Kepala Daerah yang definitif. Kapanpun, kalau kalau memang mundur 3 bulan berarti Gubernur yang harusnya berakhir Desember 2024 juga diperpanjang selama 3 bulan. Toh kami itu memang masih dalam rentang masa jabatan 5 tahun itu.

Nah sekali lagi, karena kita melihat sekalian efektifitas kemaren kan pasti ketika dipegang langsung oleh Gubernur yang definitif pasti akan lebih memiliki kekuatan hukum dan pengakuan dari masyarakat. *Nah* ini sekali lagi regulasi yang mengatur seperti itu kan belum ada. Saya melihat itu dari sekian ratus nanti kepala daerah plus gubernur itu akan ada terjadi seperti itu.

Sekali lagi, akan ada apa persoalanlah. Bukan kita mengharapkan ada masalah Pak, yakin masa jabatan itu. Sekali lagi kami berharap terjadi betul nanti kemunduran sedikit pada proses pemilihan, maka serah terima itu diperpanjang saja gubernur yang memang masih berkuasa atau bupati walikota yang memang masih masa kekuasaan itu.

Kemudian yang ketiga, terkait menurut saya memang dimajukan. Saya kira memang lebih efektif Pak karena kalau kita ingin memastikan nanti supaya serentak di awal tahun 2025 semua kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota beserta wakil akan dilantik. Saya kira memang dimajukan untuk lebih bagaimana memastikan tadi tidak ada masa transisi kekosongan jabatan.

Kemudian yang saya sampaikan sebelum itu saya kira itu bisa dihitung-hitung Bapak sekalian. *Nah* maka menurut saya, tahapan-tahapan yang selama ini sudah disusun tapi dihitung betul bagaimana tidak beririsan dengan tahapan-tahapan yang terjadi dengan pemilu.

Andai pemilu ini nanti untuk pilpresnya itu 2 putaran, sengketa dan itu sebagainya. Kalau itu masih proses berlangsung dan tahapan pilkada juga sudah mulai Bapak Ibu sekalian. Kalau kami sebagai calon mungkin tidak persoalan, tapi saya kira yang repot ini tadi dari aspek peyelenggara Pak. Apalagi kalau daerah itu yang kebetulan beririsan juga dengan masalah terkait pilpres. *Nah* menurut saya hitung-hitung itu yang perlu pasti, sekali lagi perlu betul-betul dipastikan tahapan-tahapan ini.

Kemudian yang keempat, mungkin agak keluar sedikit terkait dengan tahapan Pak. Karena di daerah ini juga mempertanyakan, termasuk saya andai saya mencalon kembali. Ini yang akan digunakan sebagai prasyarat untuk pengusungan calon kepala daerah, ini kan juga jadi masih pertanyaan di daerah.

Saya kita butuh penegasan sejak awal dan regulasi itu tersosialisasi dengan baik karena itu juga akan menambah semangat teman-teman ketika mengikuti pemilu Pak, dalam hal ini pileg. Karena kalau kami dengar sekilas karena kan katanya akan menggunakan hasil pileg 2024. Tapi sekali lagi, regulasi secara *de jure*-nya kan belum kita dapatkan, aturan-aturan itu.

Nah kalau memang ini sudah dipastian akan menggunakan hasil itu, pasti para Kepala Daerah dan partisipasi masyarakat juga saya kira akan berubah Pak karena mereka akan melihat bahwa hasil pileg 2024 itu akan menjadi dasar penentuan pengusungan kepala daerah di 2024 itu sendiri. *Nah* sekali lagi, penguatan dasar hukum *de jure*-nya secara pasti sejak awal, saya kira ini akan sangat berpengaruh juga dengan kualitas pileg secara berjenjang terutama pileg ya kabupaten kota maupun provinsi.

Kemudian yang kelima, ini sekali lagi agak keluar sedikit lagi dengan terkait dengan pileg sekalian. Kami terkait dengan kepastian kuota perempuan. Saya kira kami juga perlu menyampaikan sekalian, kami sangat mengapresiasi undang-undang yang memberikan ruang dan akses kepada perempuan itu lebih besar, kepada semua jabatan-jabatan publik terutama dalam terkait dengan pemilu.

Maka apa yang sudah dikeluarkan PKPU menurut kami Pak kami berdiskusi dengan teman-teman di daerah. Terkait dengan pembulatan Pak, persentase 30% apa kuota perempuan. Kami sangat setuju apa yang dilakukan oleh PKPU sebelumnya, yang sekarang sedang dibuat di Mahkamah Agung.

Karena menurut kami itulah kaidah ilmu pengetahuan Pak. Pembulatan itu kalau 0,5 kurang pasti ke bawah, kalau 0,5 ke atas pasti ke atas. Andai kita tidak mematuhi ini Pak, hanya karena mungkin dan lain-lain pertimbangannya. Kita menyalahi kaidah ilmu pengetahuan Pak, saya sempat berpikir andai yang

masa anak-anak kita nanti tahu seperti ini, dia menjawab soal pembulatannya seperti itu kan buat membuat kacau ilmu pengetahuan Pak.

Nah kalau soal menurut saya terkait dengan keterwakilan perempuan. Saya juga punya data, mungkin teman-teman DPR pasti lebih dari saya Pak, menganalisa Pak. Sejak keterwakilan perempuan diatur 30% dalam persyaratan pencalonan, ternyata tidak meningkatkan secara signifikan juga ya, anggota DPR perempuan yang duduk di DPR secara berjenjang.

Nah kami di Bengkulu Pak sebagai contoh. Kami tidak terlalu *care* dengan persoalan-persoalan itu. Tapi dengan 4 kursi DPR Bengkulu Pak, pernah satu periode itu perempuan semua Pak. Dan periode sekarang itu 50% perempuan Pak. DPD-nya 3 orang perempuan dan 1 laki-laki Pak. *Nah* maksud saya bukan soal persentase mewajibkan pencalonan itu.

Nah sekali lagi, kami berharap karena udah mau penetapan daftar calon tetap Pak, ini sangat mengganggu kami, terus terang saja Pak. Apalagi kita sebagai Ketua Partai. Kalau ini sampai diberlakukan perubahannya, menurut saya akan sangat mengganggu kondisi di daerah Pak, karena secara berjenjang DPD Kabupaten Kota, Provinsi, bahkan DPR RI kami sudah memastikan dengan mengikuti PKPU awal Bapak.

Nah sekali lagi, menurut kami kita mengikuti kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku universal dan tanpa sedikitpun bermaksud mengurangi hak-hak perempuan terkait keterwakilannya di DPR.

Bahkan kami ingin menyampaikan aspirasi Pak. Ada beberapa tingkatan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan KPU. Justru yang tidak ada sama sekali kuota perempuan. Padahal pada waktu itu proses seleksi Pak, ini anggota Komisi II. Waktu diusulkan ke KPU pusat, misalnya 10 besar itu ada perempuan Pak. Tapi ternyata pada waktu penentuan 5 yang jadi betul-betul jadi penyelenggara tidak ada satupun perempuan.

Nah menurut hemat kami, ini nanti bisa menjadi sebuah apa ya, kurang kurang baguslah kurang elok. Penyelenggaranya sendiri minta maaf Pak, tidak mengedepankan mematuhi aturan itu tapi ketika melakukan pengawasan dengan kita, begitu saklek dan kerasnya, andai tidak atuh kita dicoret, dikurangi, dan sebagainya.

Sementara, kami contoh di Bengkulu sendiri Pak, KPU-nya 5 orang kelima-limanya laki-laki dan pada waktu pengusulan itu 2 orang pada waktu itu 2 orang perempuan 8 orang laki-laki, ternyata yang ditentukan bukan rakyat yang menentukan, tapi kan teman-teman KPU di pusat yang memang bisa mereka yang menentukan secara *authority* mereka. Tapi faktanya ternyata justru yang dipilih semuanya laki-laki.

Nah menurut saya hal-hal seperti ini perlu kita sikapi dalam rapat ini. Kami meminta kejelasan dan kepastian itu dan kalau bisa memang Pak Dirjen OTDA memang kita bisa lebih awal lah mendapatkan kepastian-kepastian itu.

Sekali lagi kami sangat terima kasih Pak Dirjen OTDA melibatkan kami dalam kesempatan RDP kali ini. Sehingga aspirasi di daerah sungguh mendapatkan apa bisa kami sampaikan dengan baik.

Terakhir memang salam dari masyarakat dengan Komisi II. Masyarakat sangat senang Pak, menyambut baik pelaksanaan pileg serentak di 2024, sekaligus menyambut baik dengan penuh semangat juga untuk pilkada di akhir tahun dengan serentak itu. Sekarang buktinya Pak, baliho-baliho di pinggir jalan udah *nggak* karuan Pak sekarang, di mana-mana tuh menunjukkan antusias semua masyarakat untuk nyambut pesta demokrasi luar biasa.

Izin Pak Dirjen, karena itu demikian terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI II / F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Gubernur, 2 Gubernur sudah, barangkali Gubernur ketiga ada tambahan barangkali?

Ya silakan Pak Gubernur Sulawesi Selatan.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN (Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si.):

Mohon izin Pimpinan Komisi II dan anggota Komisi II.

Saya Gubernur perwakilan Komisi II, Gubernur perwakilan Komisi II di Makasar. Jadi setiap saat kami menunggu kalau mendarat di Makasar.

Mohon izin hari ini ditugaskan hadir di ruangan ini. Jadi memang kita ada satu kondisi objektif dalam pengaturan kita tentang Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, korelasinya dengan Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Daerah, korelasinya dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang DPRD, dan tentang Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional.

Saya kira ini membacanya ini harus dalam satu nafas serangkaian hukum-hukum ketatanegaraan dikaitkan dengan hukum pemilu dan pemilihan kepala daerah. *Nah* dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, sebelum tahun 2015 itu hampir setiap 5 hari sekali dilakukan pemilihan kepala daerah. Kenapa demikian, karena memang jumlah daerah otonom lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Jumlah hari itu hanya 365 hari, jumlah Kepala Daerahnya sudah 500 lebih.

Oleh karenanya, pengaturan ini lalu kita ubah di tahun 2015 serentak parsial. Lalu dilanjutkan serentak parsial lagi 2017. Kemudian 2018 semula kita rencanakan serentak nasionalnya itu tahun 2020 dalam Undang-Undang yang

lama. Lalu kita ubah melalui Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang kita rencanakan serentak nasional di 2020 lalu kita ubah menjadi 2024.

Nah maka pada tahun 2016 kita menyusun Undang-Undang Pemilu, tahun 2017 kita juga melakukan serentak nasional serentak pileg pilpres yang kita mulai tahun 2019. *Nah* bertemunya itu di tahun 2024. *Nah* inilah masa transisi demokrasi kita khususnya dalam kaitan rekrutmen politik.

Jadi *reasoning* terkuatnya salah satunya adalah kita tidak hendak mau memilih satu tahun di antara 5 tahun itu, kita fokus untuk mencapai tujuan pemilu dan pilkada dalam membentuk pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif maupun, baik di pusat maupun di daerah selesai dalam 1 tahun. Dan itu tahun transisinya adalah tahun 2024, itu dia.

Pemilu berarti *clear*. *Nah* apakah dengan Undang-Undang tersedia Undang-Undang 10 2016 bisa kita menyelesaikan transisi di 2014 ini 2024 yang akan datang dengan norma yang menyatakan dilaksanakan pada bulan Desember. Ternyata ada perbedaan norma antara Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Jadi kalau Undang-Undang Pemilunya itu *clear* ajek di di apa itu di pemungutan suaranya pada tahun itu. Kemudian secara ajek setiap 1 Oktober udah pasti ada pemilihan, apa pelantikan DPRD, DPR, dan DPD secara serentak yang sudah berlaku 5 tahun.

Nah kita hendak menyelesaikan transisi demokrasi kita itu 2024. Sehingga di tahun-tahun mendatang kita ketemunya 5 tahun sekali saja, di 2029 5 tahun kemudian, 29 ke 2034, 2034 ke 2039. Jadi dalam 5 tahun itu hanya 1 tahun yang kita gunakan untuk suksesi kepemimpinan nasional dan daerah, 4 tahun fokus membangun, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Nah kita cek sekarang hukum yang tersedia dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, apakah Undang-Undang Kepala Daerah hari ini dengan hanya mengatur tentang pemungutan suara pada bulan Desember bulan November, memungkinkan menghasilkan Kepala Daerah selesai tahun 2024?

Pada kondisi lain yang disampaikan oleh senior saya ini yang Gubernur beneran, kalau saya menjabat nih, ini Wakil Ketua Umum APPSI kemudian Gubernur Bengkulu.

Bahwa per 1 Januari 2025, sekarang ini kan setengahnya penjabat seperti saya. Yang bukan penjabat seperti beliau juga setengahnya. Per 1 Januari 2025 sudah tidak ada lagi kepala daerah yang definitif. Jadi PJ semua jadinya 1 Januari 2025. Jika tanggal 27 November yang sudah kita tentukan awalnya itu tidak mampu menghasilkan kepala daerah definitif per 1 Januari 2025. Jadilah kitapun pemerintahan PJ, 540 14 kabupaten kota 38 gubernur PJ semua.

Sampai kapan PJ-nya, merujuk pengalaman kita pilkada 2020 Kabupaten Yalimo, yang kita laksanakan juga bersamaan 9 Desember 2020, pelantikannya Februari 2022. Kalau kita berasumsi yang sama, jika pemungutan suara November tahun 2024. Kalau sengketanya lebih dari 1 tahun maka nanti juga pelantikannya 2026 gitu.

Lalu buat untuk apa keserentakan itu, inilah pertanyaan para akademisi mempertanyakan apa makna serentak itu. Apakah hanya serentak proses, dalam hal ini pemungutan suaranya dan kampanye dan seterusnya, atau juga serentak hasil. Mestinya logiknya itu seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada juga demikian mestinya serentak proses juga serentak hasil.

Oleh karenanya, menjadi kebutuhan memang supaya transisi kita ini selesai di 2024, per Januari 2025 kita memang mungkin sejalan dengan pendapat publik dan para akademisi yang menyatakan seyogyanya transisi itu diselesaikan 24, per Januari 2025 mestinya 545 Kepala Daerah itu sudah semua ada kepala daerahnya, itu demikian.

Oleh karenanya, konsekuensi dari itu jika kita setuju bahwa 2002 Januari 2025 seluruhnya sudah terpilih menjadi kepala daerah definitif maka konsekuensi selanjutnya memang mesti kita dorong terjadinya perubahan waktu pemilihan yang semula kita bulan November, mungkin kita pikirkan ke waktu lainnya.

Saya kira konsekuensi itu mungkin.

Nah selain itu, yang saya sampaikan tadi keselarasan soal rencana pembangunan nasional. Dulu kita membentuk keserentakan ini, kita hendak menselaraskan antara manajemen politik dan manajemen pembangunan 5 tahunan dan 20 tahunan.

Nah jika masa jabatan Kepala Daerah hasil pemilu pilkada 2024 tidak selaras dengan masa jabatan bupati, gubernur, dan presiden. Maka rencana kita menselaraskan itu tidak akan terwujud lagi gitu. Lalu pertanyaan kritisnya para akademisi, buat apa serentak kalau pada akhirnya tidak mencapai tujuan keserentakan yang kita maksudkan.

Dalam kerangka inilah patut untuk dipertimbangkan pikiran-pikiran itu supaya tujuan pemilu dan pilkada membentuk pemerintahan itu biar dapat diwujudkan. Memang patut untuk di kita untuk mengecek kembali, bahkan tadi dengan tegas Waketum APPSI merekomendasikan dan mengajukan pandangan untuk ditinjau kembali yang bulan November tersebut. Supaya benar-benar Januari 2025 bisa terbentuk pemerintahan yang efektif, hasil pilihan rakyat, 38 gubernur, 514 bupati walikota seluruh Indonesia.

Demikian pandangan kami, Bapak izin.

WAKIL KETUA KOMISI II / F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Gubernur Sulawesi Selatan.

Saya kira APKASI APPSI ini udah selesai. Kalau tambahan barangkali udah cukup ya kita pindah ke APKASI dan Pimpinan langsung dipimpin oleh Ketua Komisi.

Silakan Bapak dari APKASI.

ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

**Yang terhormat Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Dirjen OTDA, Dirjen Polpum dan,
Ketua APPSI dan beserta Gubernur Jambi dan juga bersama kami ada
Bupati Serang, Bupati Sijunjung,**

Kalau Bupati Serang ini Bendahara APKASI, yang Sijunjung Wakil Sekretaris APKASI.

Izin Pimpinan.

Pertama kami atas dari APKASI mengucapkan terima kasih bahwasanya bisa ikut dengan Dirjen dan seluruh kita hadir di sini untuk bisa berkoordinasi tentang soal pilkada.

Kami dari APKASI menyambut baik ini, karena apa? Kita tahu kami setiap hari di daerah dan melihat merasakan bagaimana kesiapan kawan-kawan di daerah untuk menghadapi pileg, pilpres, dan pilkada. Kalau untuk pileg dan pilpres semua sudah berjalan dengan baik, baik pun kami penyiapan untuk di KPU, Bawaslu, dan pengamanan dari Polres, Dandim, dan penegak hukum lainnya.

Dan dalam hal ini, untuk pilkada teman-teman APKASI ini ada 416 Pimpinan di bawah APKASI. Semuanya mengucapkan terima kasih dan sesuai tadi disampaikan APPSI bahwasanya ada keinginan untuk dipercepat pilkada ini, kami menyambut baik, karena apa? Karena nanti di tahun 2025 itu kami kan yang pilkada 2020 kan dihabiskan di akhir jabatan.

Dan ada beberapa catatan bagi kami. Yang pertama adalah proses pilkada itu efisiensi waktu Pimpinan, jangan terlalu panjang masa kampanyenya. Karena itu buat kita letih dan karena setelah pileg dan pilpres itu kita masih ada kotak-kotaknya antara pemilih A B C dan D. *Nah* kemudian kita masuk lagi pilkada, *nah* kalau pesertanya lebih dari 3,4, atau 5 pasangan dan itu akan menjadi apa, seperti tidak kondusif saja dan kami minta waktu efisiensi pilkadanya jangan terlalu panjang.

Dan kemudian dalam proses pilkada ini kalau ada daerah-daerah yang bersengketa setelah pemilihan, misalnya dimajukan bulan September itu tepatnya nanti September pemilihannya dimajukan sebulan. Kalau bisa penyelesaiannya dilantik itu sama-sama juga dengan yang tidak bersengketa itu.

Jadi kita melihat ada 545 Kepala Daerah nanti yang ikut serta dan ini sangat sibuk apalagi di MK dan KPU Bawaslu se-Indonesia. Dan saya kami berharap dari APKASI ini bisa kita atasi, bagaimana poin-poinnya yang bisa ke MK itu. Jadi jangan terlalu banyak ke MK, jadi kalau terlalu banyak ke MK itu kan memperlambat di pelantikan kepala daerah.

Nah kemudian karena sudah banyak yang apa PJ dan kawan-kawan yang 2020 kan tinggal 273 yang definitif sampai Desember itu. Kalau itu bisa kita buat regulasinya dengan DPR RI Komisi II membuat suatu percepatan dan penyelesaian permasalahan pilkada ini dengan cepat dengan baik *Inshaallah* dengan izin Allah kita bisa melaksanakan pelantikan serentak se-Indonesia 1 Januari 2025 itu.

Dan kemudian ada juga masukkan Pimpinan, karena 545 ini kan semua bupati walikota gubernur ini kan masing-masing juga visi misinya. Apakah disamakan *nggak* dengan pemerintah pusat biar seiring sejalan? Supaya keberhasilan daerah itu berjalan juga dengan pemerintahan pusat, cuman itu masukan saja Pimpinan. Karena kita ingin arahnya sama dan jelas keuangan pemerintahan ini bisa dirasakan oleh masyarakat di daerah-daerah.

Saya rasa itu, ada tambahan kira-kira, cukup.

Saya rasa itu Pimpinan, terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih Saudara Ketua APKASI.

Selanjutnya kami silakan yang mewakili ADKASI.

**PERWAKILAN ASOSIASI DPRD KABUPATEN SELURUH INDONESIA/
ADKASI (CHARLES IMBIR, S.E., M.Si.):**

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Shalom,*

**Yang saya hormati Komisi II DPR RI,
Sekjen Kementerian Dalam Negeri kemudian,
Ketua dan pengurus APPSI,**

**Ketua Umum APKASI, dan semua undangan,
Lalu anggota DPR Komisi II yang hadir,**

Saya Charles Imbir dari ADKASI Papua Barat bersama dengan Pak Terius Yigibalom dari ADKASI Papua. Kami diminta oleh Ketua Umum dan Sekjen untuk hadir di sini karena beliau berdua ada kegiatan di daerah yang tidak bisa hadir, sehingga minta maaf dan kami diminta untuk hadir karena kebetulan kami juga ada di Jakarta.

Pesan yang ingin kami sampaikan dari organisasi kami, tidak jauh seperti apa yang sudah disampaikan. Hanya mungkin ada tambahan sedikit adalah kami ADKASI meminta untuk anggaran tidak dibebankan seluruhnya atau 40% itu di tahun ini langsung ke kabupaten tapi kalau bisa itu dari pusat juga membantu begitu, karena kondisi daerah yang berbeda-beda, lalu adalah beberapa tantangan di tiap daerah. Sehingga itu perlu kita sampaikan.

Yang kedua, kebetulan teman-teman ADKASI Papua Barat dan Papua tahu kita hadir di sini, mereka juga titip pesan. Kalau bisa untuk Papua itu pemilihan serentak supaya tadi aman, kondusif, dan damai tidak seperti yang tadi seperti yang dikatakan oleh dua organisasi APPSI dan APKASI, itu mungkin tidak pemilihan bupati walikota di tanah Papua itu dipilih oleh DPRK.

Seperti itu itu ada pesan seperti itu, itu juga untuk menjaga situasi tidak terlalu rumit ke depan, seperti itu dengan seperti penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan.

Nah itu beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan, yang lainnya saya pikir sudah sama dengan teman-teman dari APPSI dan APKASI. *Nah* untuk itu kita ucapkan terima kasih atas forum ini dan semoga forum ini akan membawa manfaat bagi negara ini secara bersama.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Saudara yang mewakili dari ADKASI.

Bapak, Ibu sekalian,

Tadi sudah sama-sama kita dengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia kemudian Asosiasi Pemerintahan Kabupaten dan juga dari Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia.

Pak Dirjen ada yang mau disampaikan, *nggak* ada ya?

Baik, saya kira untuk yang berikutnya kami persilakan kalau ada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Komisi II yang ingin melakukan pendalaman.

Pak Gaus, Pak Syamsurizal, Pak Amin, Pak Endro.

WAKIL KETUA KOMISI II / F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Syamsul dulu.

WAKIL KETUA KOMISI II / F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih.

**Pak Ketua dan Pak Gubernur yang kami hormati dan,
Dirjen OTDA dan,
Gubernur Sulawesi Selatan,**

Saya ingin menyampaikan sedikit saja berkenaan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur tadi Gubernur Jambi dan Gubernur Bengkulu. Terutama yang berkenaan dengan apa yang kami tangkap, itu ada keinginan dari pihak APKASI dan pihak APPSI untuk mempercepat penyelenggaraan pilkada agar tidak melampaui tahun 2024 ke 2025.

Barangkali kita ya hampir saja sepakat, karena kita ingin penyelegaraan pemerintah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi dan kabupaten kota, itu berada dalam satu rezim.

Sehingga yang namanya rencana pembangunan jangka panjang yang akan dituangkan yang visi misi presiden dan yang dituangkan dalam RPJMN dan RPJMD-nya provinsi dan kabupaten kota itu bisa dibuatkan satu arah, jadi satu bunyinya.

Sehingga kita sepakat juga kalau ini memang gagasannya cukup baik. Artinya masing-masing gubernur dan masing-masing kepala daerah tidak memiliki visi misi yang tersendiri yang di luar dari visi misi presidennya.

Dan ke depan tentunya kita sangat mendukung ini karena apa yang menjadi kerancuan selama ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang kita sudah menyiapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tapi pemilihan kepala daerahnya berada pada penyelenggaraan yang agak sedikit, katakanlah kocar-kacir karena masih ada PJ-PJ nya.

Jadi oleh karena itu, kita sepakat ini seperti yang dikatakan oleh Pak Dirjen vokum dalam hal ini, agar *scope* penyelenggaraan pemerintahan itu pada batas maksimum pada Desember 2024 ini. Karena mereka-mereka yang dipilih pada penyelenggaraan pilkada 2020 itu betul-betul harus diselesaikan terhadap penyelenggaraan 2024.

Nah satu hal yang perlu kita ingatkan, bahwasannya tahapan penyelenggaraan pilkada itu adalah 12 bulan. *Nah* kalau kita sepakati misalnya Agustus atau September, *nah* kita mesti bisa menghitung 12 bulan ke depannya agar tahapan itu sudah harus sampai dan dimulai kapan itu pada bulan. Kalau kita Desember, kalau kita majukan menjadi September itu berarti tahapannya akan kita temui pada bulan September. Sementara ini kita sudah berada pada bulan September tahun 2023.

Jadi ini yang juga perlu kita perhatikan agar tidak menyulitkan bagi daerah-daerah untuk menyiapkan NPHD-nya. Karena NPHD juga masih diperhitungkan dari sekarang, naskah apa, hibah daerah itu, nota kesepakatan hibah daerah itu. Jadi itu mesti sudah dianggarkan dari sekarang.

Itu yang ingin kami sampaikan.

Berikut yang ingin kami sampaikan adalah yang masih kita ingat. Kalau kita lihat perkembangan pilpres selama ini dan pencalonannya, walaupun belum dapat kita tangkap, bisa-bisa 3 atau kemungkinan 4 bisa juga. Ini berarti peluang untuk 2 putaran pilpres itu akan ada.

Nah kami ingin mengingatkan agar tidak terjadi irisan-irisan tahapan penyelenggaraan pilpres dengan tahapan penyelenggaraan pilkada yang sedikit agak sangat disibukan, setidaknya-tidaknya kita menyiapkan tenaga-tenaga Ad Hoc itu yang betul-betul siap pakai. Jadi mereka yang masih kuat masih muda, yang terjadi seperti pemilu 2019 banyak menjadi korban karena kesibukan yang luar biasa.

Dan aturan untuk itu mesti kita siapin dari sekarang. Yakni bagaimana tenaga muda atau mereka bisa ditukar tukarkan dengan tenaga Ad Hoc ini, dan tentunya ini mendekatkan juga dengan penyediaan dana pemilu tahun 2024.

Sementara kita sedang merumuskan bersama dengan KPU perhitungan dana pemilu untuk KPU-nya dan Bawaslu. Kita juga memperhitungkan dana pemilu itu berkaitan dengan tumpang tindihnya irisan-irisan yang terjadi. Tumpang tindih ini yang menyebabkan juga dana penyelenggaraan pilkada kita sedikit agak lebih besar daripada biasa.

Kemudian berkaitan dengan kuota perempuan, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi itu. Kami ingin menyampaikan saran saja bahwasannya kita lebih jelasnya ini saya misalnya dari Fraksi PPP akan bersikap menolak itu. Karena tidak mungkin rasanya dengan 514 kabupaten kota ditambah dengan 38 provinsi kita merombak merubah daftar caleg kita di masing-masing Dapil.

Katakanlah masing-masing Kabupaten itu punya 4 Dapil paling sedikit rata-rata, kali 4 berapa ribu caleg yang akan kita rombak dan itu adalah pekerjaan yang sangat tidak mungkin. Dengan sisa waktu hanya sekitar 5 bulan terhitung dari sekarang. Itu adalah sesuatu yang mustahil, itupun yang kami lihat apa yang diputuskan oleh MA itu tidak merupakan perintah untuk segera dilakukan.

Barangkali itu bisa kita terapkan pada saat pemilu tahun 2029.

Barangkali Pak Ketua itu saja yang dapat kami sampaikan, berkenaan dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pimpinan APKASI, APPSI, masing-masing gubernur yang ada saat ini.

Terima kasih Pak Mendagri.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Syamsurizal.

Selanjutnya Pak Gusparadi Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

**Pimpinan dan anggota Komisi II yang kami hormati,
Bapak Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Otda,
Yang saya hormati pengurus APPSI, yang hadir pada kesempatan ini
adalah Gubernur Jambi, Gubernur Bengkulu, dan Gubernur Sulawesi
Selatan,
Yang saya hormati Ketua APKASI dari Kabupaten Dharmasraya dan
Kabupaten Serang, dan Kabupaten Sijunjung dan,
Yang saya hormati pengurus ADKASI dari Papua,
Kemudian hadirin dan hadirat yang berbahagia,**

Menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para tamu kami. Saya mewakili dari 4 Asosiasi, 3 Asosiasi berkaitan terhadap adanya gagasan keinginan untuk bagaimana dimajukan pelaksanaan daripada pilkada yang sudah ditetapkan oleh kami Komisi II bersama pemerintah, yaitu tanggal 27 November.

Lalu Bapak-Bapak menyampaikan dengan berbagai pertimbangan dan alasan, bagaimana kalau seandainya pelaksanaan pilkada itu bisa dipercepat. Dari paparan yang disampaikan tadi saya dapat memahami, tentu ini menjadi pertimbangan bagi kami Komisi II untuk membicarakannya dengan pemerintah. Bagaimana sikap kami nanti, tentu akan kami lakukan rapat internal, setelah itu juga kami bawa kesepakatan kami ini dengan pihak pemerintah.

Dan terakhir, tentu tidak terlepas juga peran daripada pelaksana pilkada itu bahwa pelaksanaan pilkada itu atau pelaksana pemilu juga, itu yang melakukannya bukanlah pemerintah, bukanlah DPR. Tentu akan juga kami bicarakan dengan KPU.

Sebab bagaimanapun tadi sudah juga disinggung oleh kawan-kawan. Bahwa tahapan-tahapan pemilu itu sudah kita lakukan secara rigid dan juga juga memproyeksikan kemungkinan terjadinya putaran kedua pelaksanaan pilpres. Tentu ini sangat menentukan juga, apakah dimungkinkan percepatan itu.

Tadi saya juga menyimak bahwa banyak nilai-nilai positif yang dapat diambil, manakala pelaksanaan itu kita percepat. Dan saya sudah banyak berkomentar tentang hal ini, itu adalah bagian juga menangkap bagaimana respon masyarakat terhadap adanya keinginan, adanya gagasan. Itu juga tentu ini bahagian dalam rangka melakukan penguatan sikap kita, apakah memang akan dipercepat atau tidak.

Oleh karena itu, kehadiran Bapak dan Ibu pada bahwasannya ini melakukan RDPU dengan Komisi II, ini sesuatu yang sangat berharga dan penting, dan ini jadi referensi juga bagi kami untuk menyatakan sikap dan menentukan beberapa hal dari usul-usul yang disampaikan tadi.

Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan, tentu karena pelaksanaan Pilkada itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di mana dikatakan bahwa pelaksanaan pilkada itu dilakukan di bulan November, sedangkan tanggalnya kami bersama pemerintah yang menentukan dan itupun sudah ditetapkan dan disetujui oleh KPU dan Bawaslu.

Tentu ini harus dilakukan juga perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 16. Apakah nanti lewat Perpu atau walaupun ini yang yang berkaitan karena berkaitan dengan percepatan?

Karena undang-undang mengatakan November, tentu harus lewat undang-undang pula kita melakukan revisinya. Perevisian itu bisa dilakukan 2 bentuk, apakah mekanisme seperti biasa atau lewat Perpu. Ini adalah sesuatu yang sangat kami tunggu-tunggu terhadap sikap dan masukan dan saran.

Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi berkah dan menjadi ibadah bagi kita bersama. Dan tentu saya dari Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan dan saran dan minta pertimbangan agar dilakukan percepatan terhadap pelaksanaan daripada pilkada itu.

Barangkali demikian, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Pak Gaus.

Selanjutnya Pak Amin.

F-P. NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

**Ketua dan anggota Komisi II yang saya hormati,
Dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota yang hadir hari ini
yang saya hormati,**

Yang pertama saya mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di ruang Komisi II dalam rangka untuk menyampaikan masukan, aspirasi yang berkembang di masing-masing pemerintahan, semua level. Tentu ini akan menjadi bahan yang akan kita diskusikan lebih dalam.

Namun demikian, saya juga perlu menyampaikan bahwa pilkada ini memang momentumnya bersamaan dengan pilpres pileg yang saat ini sudah memasuki tahapan. Sejak awal sebetulnya dari Anggota Komisi II itu ini merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Tapi waktu itu momentumnya memang belum tepat.

Namun dalam perkembangannya ada suasana dan situasi yang mungkin ini menjadi pertimbangan kita semua. Tentu aspirasi ini akan menjadi bagian yang perlu kita diskusikan lebih dalam.

Yang kedua, saya hanya ingin pastikan bahwa pemilu Pemilukada 2024 masing-masing pemerintahan, baik provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia sudah memastikan alokasi anggaran yang digunakan untuk pilkada sudah teralokasi. Karena ini menyangkut kebutuhan daerah, tidak mungkin APBN ada di situ.

Dari semua kegiatan yang pernah dilakukan oleh Komisi II ketika kunjungan kerja ke beberapa provinsi dan sebagainya. Semua respon dari kepala daerah cukup cukup positif dan ingin mewujudkan proses demokrasi di daerah ini betul-betul berjalan dengan baik.

Oleh karenanya, saya ingin pastikan lagi anggaran pilkada pada saat ini mengharus sudah dialokasikan. Karna pembahasan 2024 kan saat ini Pak, ini kan menjelang final kan? Maka Kepala Daerah yang hadir hari ini pastikan perhitungannya itu betul-betul proporsional, itu.

Yang terakhir terkait dengan waktu November atau maju bulan September, tentu ini semua akan kita cermati bersama sepanjang itu tidak berbenturan dengan irisan tahapan-tahapan di pileg dan pilpres. Karena kalau itu maju September, pasti tahapannya juga harus maju ya. Selama itu tidak menimbulkan resistensi di kalangan penyelenggara, saya kira aspirasi Bapak dan Ibu semua patut kita pertimbangkan.

Kami dari Fraksi Partai Nasdem tentu ini nanti akan kita jadikan bahan untuk pembahasan lebih lanjut. Urusan teknisnya merevisi undang-undang saya kira Pak Dirjen lebih tahu, apakah itu pada mekanisme normal atau melalui mekanisme yang lain.

Tapi poinnya adalah adalah kita ingin demokrasi di negeri kita ini bisa kita hadirkan secara berkualitas, partisipasi publik dan peran semua stakeholder ini betul-betul bisa memberikan jaminan bahwa kita ini menghadirkan Pemimpin yang terbaik di masing-masing provinsi kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Saya kira ini Ketua, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Pak Amin, Pak Endro.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang kami hormati kawan-kawan Komisi II, serta dari,
Pak Dirjen Polpum,
Dirjen OTDA serta,
Asosiasi Pemprov, APKASI dan,
Saudara kawan-kawan yang hadir pada siang hari ini,**

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Pertama-tama saya mengapresiasi dari pertemuan sore hari ini yang intinya untuk apa penajaman pendalaman tentang masalah pilkada. Kami memahami kaitannya dengan apa situasi politik nasional yang ada serta keteraturan dalam pemerintahan di daerah.

Kita ingat sekarang kita memasuki tahapan pilpres dan pileg. Dan juga dalam tahapan ini kita mendaftar banyak sekali kepala daerah yang dijabat oleh penjabat termasuk Pak PJ Gubernur Sulsel yang terhormat akhirnya kesampean juga. Moga-moga aspirasi Komisi II juga terwakili sesuai dengan apa namanya pernyataan tadi.

Kami ingin pendapat kepala daerah memang misinya adalah melanjutkan pemerintahan daerah yang notabene adalah PJ Kepala Daerah itu kan tidak ada visi misi, dia melanjutkan kepala daerah yang lama. Dan juga kami minta juga kan, yang namanya PJ ini kan tidak terlalu lama, tidak terlalu lama. Sehingga daerah itu menjadi stabil pembangunannya menjadi fokus.

Yang berikutnya, kita khawatir kalau pilkada pilpres ini terjadi 2 putaran. Dan kami minta juga coba nanti kita perdalam lagi terkait dengan pilkada. Ini semangatnya sebenarnya untuk efisiensi pemerintahan.

Tadi Pak Dirjen sudah mengatakan daerah itu perlu waktu, perlu waktu untuk membangun. Jangan sampai seperti kemarin-kemarin setiap 5 hari sekali ada pilkada, ini kan kapan Menteri Dalam Negeri akan bekerja apalagi Dirjen Otda. *Nah* ini ini kerjanya cuma bikin *desk* Pilkada terus, karena semacam itu.

Nah maksud saya, keserentakan ini perlu. *Nah* ini sudah mulai yang terakhir ini 2024, ini keserentakan dalam pilkada. Hanya saya juga, kita mari kita berhitung jangan sampai keserentakan pilkadanya ini berakhir tidak pada pelantikan serentak, kan itu.

Kita itung waktunya, apa gunanya pilkada dilakukan serentak tapi pelantikannya tidak. Nanti akan kembali lagi ke pola lama. Kasihan Menteri Dalam Negeri, ada Kemendagri nih kesulitan untuk mengelola apa situasi politik di daerah.

Nah jadi harapan kami, ini pilkada serentak dan juga pelantikannya juga harus serentak. Pelantikannya harus serentak, itu yang penting. Pelantikannya serentak dulu terus pilkadanya jelas serentak, karena bagaimana kita mencari upaya *schedule* jadwal yang ada supaya pelantikannya serentak. Diitung juga kaitannya dengan apa namanya gugatan-gugatan yang ada.

Ini ini menjadi penting, tidak ada guna kalau umpamanya pilkada serentak tapi pelantikannya tidak serentak. Harapannya ini *ending*-nya sebenarnya keserentakan dari pelantikan. Sehingga siklus ini siklus yang terakhir yang sudah mapan, syukur-syukur kalau ke depan ada lebih progresif lagi, semuanya diserentakan.

Jadi kita bisa bekerja leluasa, mau pilpres, pileg, maupun pilkada jadi satu tarikan nafas selesailah ini urusan apa, pergulatan pergulatan dari kekuasaan yang ada. Tinggal membangun daerah, rakyat akan menjadi lebih terayomi dan lebih fokus kepala daerah untuk melakukan apa namanya pembangunan daerah.

Jadi itu mungkin dari masukan saya. Nama saya Endra Suswanto Yahman. Saya dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Lampung.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II / F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Endro S Yahman dari Fraksi PDI.

Ada lagi yang mau menyampaikan pendalaman tanggapannya?

Pak Teddy silakan.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.Sos.):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi persoalan Perpu ini memang subjektivitas kemendesakannya ada di Presiden. Walaupun kaitannya juga dengan, langsung *to the point* aja ini Pimpinan ya.

Walaupun juga berkaitan juga dengan persetujuan nanti di DPR. Ketika DPR setuju maka ini akan di undang-undangkan. *Nah* kalau kita melihat memang dulu di DPR ini Komisi II. Tadi sudah disinggung juga tentang ingin adanya perubahan atau revisi undang-undang, baik undang-undang saya menyebut istilah dengan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada.

Di Undang-Undang Pemilu kita sudah pernah mengeluarkan Perpu, Undang-Undang tentang Pilkada juga udah mengeluarkan Perpu. Pilkada kaitannya dengan masa pandemi, kemarin ketika memundurkan dari September ke Desember itu adalah kita keluarkan Perpu.

Kemudian juga untuk Undang-Undang tentang Pemilu kita juga keluarkan Perpu, karena memang ya itulah yang menjadi kesepakatan kita ketika kemudian kita di Komisi II inginnya ada revisi karena memang undang-undang juga terlalu rigid mengatur dan sebagainya dan sebagainya. Namun karena kemudian ada tsunami lah istilah saya, ada tsunami sehingga tidak ada yang namanya revisi Undang-Undang Pemilu. Dan itu, kemudian yang akhirnya bergulirlah seperti sekarang ini.

Nah catatan kami memang kalau kemudian yang harus diperhatikan oleh penyelenggara nanti adalah kaitannya dengan, yang pertama adalah aspek sosiologisnya tentu. Jangan sampai kemudian ini menjadi problem tersendiri ke kita kemudian ada dimajukan dari November ke katakanlah September. Terutama kegaduhan-kegaduhan yang nanti berujung kepada hal-hal yang kontraproduktif. *Nah* ini yang harus mungkin harus dihindari.

Tapi kemudian ketika DPR ketika presiden, pemerintah dalam hal ini sepakat dengan DPR dan juga kemudian KPU-nya juga siap solid untuk menyelenggarakan pilkada dimajukan. Ya tentu kita di Dewan juga nanti mungkin akan memberikan tanggapannya masing-masing Partai persetujuannya mungkin dan sebagainya.

Hal-hal inilah juga yang kemudian juga harus menjadi *concern* kita disamping ada aspek teknis dan ada aspek non teknisnya. Aspek teknisnya adalah kaitan dengan penyelenggara pemilu. Dan memang kita juga sudah berpengalaman lah, kemudian tapi ada aspek non teknisnya yang ini juga harus tetap menjadi *concern* kita juga.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI II / F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Teddy Setiadi.

Bapak, Ibu yang kami hormati,

Tadi sesuai dengan kesepakatan kita bahwasannya kita akan menyelesaikan pertemuan ini pada pukul 15.30, sudah lewat 2 menit. Barangkali kita perlu memperpanjang beberapa menit saja.

Namun sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pimpinan Komisi II bahwasannya kita tidak akan membuat kesimpulan, tapi kami sudah dapat merekam apa yang menjadi keinginan kita bersama. Baik itu yang disampaikan oleh APPSI dengan beberapa Gubernurnya, maupun apa yang sudah disampaikan dari APKASI, dan ADKASI juga.

Keinginan kita semua hampir sama, haya saja nanti kalau memang ini menjadi kesepakatan kita, kita perlu merumuskannya dengan Perpu, entah itu memang Perpu perubahan jadwal waktu. Karena ketetapan tanggal November tahun 2024 itu sudah menjadi keputusan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Oleh karena itu, apakah nanti akan Perpu atau bagaimana keputusan politiknya, itu kita akan mengikuti perkembangan politik terakhir ini bagaimana. Namun kami memberikan kesempatan kepada Kemendagri, silakan Bapak Akmal Pak Dirjen untuk menyampaikan beberapa komentarnya.

Silakan Pak.

DIRJEN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI (Dr. AKMAL MALIK, M.Si.):

Baik Pimpinan terima kasih.

**Yang kami hormati Pimpinan, Ketua Komisi II,
Bapak, Ibu sekalian,**

Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke kami dalam RDP ini. Kami akan menyampaikan kepada Bapak Menteri bahwa kesempatan baik yang diberikan kepada kami membawa teman-teman Asosiasi memberikan sebagai bentuk artikulasi kepentingan.

Dan ini adalah kesempatan agregasi politik yang sangat bagus sekali. Sehingga kepentingan-kepentingan politik yang sangat bernas akan menjadi sebuah peristiwa penting yang sangat bagus dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik di negeri ini.

Sekali lagi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi II tindaklanjut yang akan dilakukan kedepan.

Demikian Pimpinan, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI II / F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Dari Dirjen Polpum, bukan Gubernur.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN (Dr. BAHTIAR BAHARUDDIN, M.Si.):

Sekali lagi kami tunggu di Makasar Bapak karena sebagai penjabat gubernur perwakilan Komisi II.

Kami terima kasih sebelumnya, makasih.

WAKIL KETUA KOMISI II / F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Jadi apa Ibu ini ada undangan ke Makassar ya.

Bapak, Ibu yang kami hormati,

Barangkali kita sudah dapat memahami apa yang menjadi keinginan bersama dari kita semua. Namun kita tidak tidak menyimpulkan kesimpulan pada hari ini. Kita sudah bisa menangkap apa yang jadi keinginan kita bersama.

Mudah-mudahan kita liat juga perkembangan politik terakhir bagaimana, karena ini perhitungan perubahan-perubahan politik ini sepertinya per menit ini yang berkaitan dengan perkembangan Partai walaupun calon mencalon dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita baca medsos, komentar masing-masing para pakar politik nasional luar biasa, baik itu di medsos ataupun di televisi ataupun di radio.

Bapak, Ibu yang kami hormati,

Terima kasih atas partisipasi kita bersama dan terima kasih atas waktu yang sudah disiapkan oleh Pak Mendagri, dalam hal ini Pak Dirjen OTDA dan Bapak-Bapak Gubernur. Gubernur Jambi, Gubernur Bengkulu, serta Gubernur apa istilahnya tadi, Gubernur Plj Sulawesi Selatan dan Bupati Dharmasraya, Ibu Bupati Serang, dan Sinjunjung, serta dari ADKASI.

**Bapak, Ibu yang kami hormati,
Para anggota yang kami banggakan,**

Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini, dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirobbil alamin* pertemuan ini kita nyatakan kita tutup. Semoga Allah SWT merestui dan melindungi kita semua.

*Wabillahitaufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.36 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KASUBAG RAPAT KOMISI II**

**Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002**